



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 September 2018/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM
SUB UNIT KERJA : MAHKAMAH SYARIAH PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : SYAFRUDDIN
2. Jabatan : PANITERA
3. NHK : 480956

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	850.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 274 m2/200 m2 di ACEH BESAR, HASIL SENDIRI Rp. 800.000.000		
2. Tanah Seluas 112 m2 di ACEH SELATAN, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	192.000.000
1. MOBIL, DAIHATSU TERIOS TX Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 180.000.000		
2. MOTOR, YAMAHA JUPITER Z 110CC Tahun 2008, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA SOUL GT 113 CC Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	----
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.042.000.000
III. HUTANG	Rp.	514.573.999
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	527.426.001

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta



- kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **23 Januari 2019**.
 4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.